

## TRANSFORMASI NILAI SHURA ISLAM KE DALAM PRINSIP DEMOKRASI MODERN

**Luluk Anisah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

*lukanisah@gmail.com*

**Luluk Anisah, M. Nur Afandi**

UIN Sunan Ampel Surabaya

*noorfandie@gmail.com*

**Asyhadillah Allero Zyulfikhar**

UIN Sunan Ampel Surabaya

*asyhadillahzyulfikhar@gmail.com*

**Abstrak:** This article discusses the appointment of Uthman bin Affan as the third Caliph in Islamic history and analyzes its relevance to the principles of modern democracy. In the context of Islamic history, the election of Uthman bin Affan is viewed as an event involving a collective decision by the Muslim community through consultation (shura) to select a leader deemed capable of safeguarding the interests of the ummah. However, throughout history, Uthman's appointment also sparked dissatisfaction and protests related to nepotism and the concentration of power within his family. This article explores how the concepts of consultation and public participation in selecting leaders can be linked to modern democratic principles such as public involvement in political processes, accountability, and transparency. This analysis aims to provide a deeper understanding of how Islamic values in decision-making processes can contribute to the development of democracy in the contemporary era, while also highlighting the challenges faced in its implementation.

**Kata kunci:** Utsman bin Affan, Modern Democracy Principles, Democracy

**Abstract:** Artikel ini membahas pengangkatan Utsman bin Affan sebagai Khalifah ketiga dalam sejarah Islam dan menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Dalam konteks sejarah Islam, pemilihan Utsman bin Affan dipandang sebagai sebuah peristiwa yang melibatkan keputusan kolektif umat Muslim melalui

musyawarah (shura) untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjaga kepentingan umat. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, pengangkatan Utsman juga menimbulkan ketidakpuasan dan protes terkait dengan praktik nepotisme dan konsentrasi kekuasaan dalam keluarganya. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana konsep musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti keterlibatan publik dalam proses politik, akuntabilitas, dan transparansi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan demokrasi di era kontemporer, serta menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

**Keywords:** Utsman bin Affan, Prinsip-Prinsip Demokrasi Modern, Shura (Musyawarah)

## Pendahuluan

Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak hanya berdampak pada arah kepemimpinan umat Muslim pada masanya tetapi juga memberikan fondasi untuk berbagai studi historis dan politik mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal luas karena sifatnya yang lembut, kemurahan hatinya dalam membantu masyarakat, dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an, terpilih menjadi khalifah melalui sebuah mekanisme yang disebut *Syura* (musyawarah). Mekanisme ini melibatkan enam sahabat utama yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab, untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan dalam memilih pemimpin yang akan menggantikan beliau. Proses musyawarah ini mencerminkan pentingnya konsultasi dan kerja sama dalam mengambil keputusan yang besar, sebuah nilai yang memiliki kemiripan

dengan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi modern, seperti upaya mencapai konsensus dan penghormatan terhadap pendapat yang beragam<sup>1</sup>

Demokrasi modern pada umumnya dibangun di atas beberapa prinsip utama, seperti partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam proses pemerintahan, keadilan yang merata dalam perlakuan terhadap semua individu, serta akuntabilitas pemimpin terhadap rakyatnya.<sup>2</sup> Meskipun istilah "demokrasi" dalam pengertian formalnya belum dikenal pada masa kekhalifahan, beberapa nilai inti dari demokrasi ini sudah mulai terlihat dalam berbagai praktik pemerintahan Islam awal. Salah satu contohnya adalah penggunaan *Syura* oleh Umar bin Khattab untuk menentukan penggantinya.<sup>3</sup> Proses tersebut menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dan menghormati aspirasi serta pendapat dari individu-individu yang dianggap memiliki kapasitas dan wawasan. Dalam konteks ini, pengangkatan Utsman bin Affan dapat dianggap sebagai sebuah contoh awal dari penerapan prinsip-prinsip yang memiliki kemiripan dengan sebagian elemen demokrasi modern, meskipun dilakukan dalam format yang berbeda.

Namun, perlu dipahami bahwa pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah juga berlangsung dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang sangat berbeda dengan dunia modern. Masyarakat Arab pada masa itu didominasi oleh struktur sosial yang bersifat tribal dan hierarkis, sehingga proses pemilihan pemimpin tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat secara langsung sebagaimana yang kita kenal dalam demokrasi universal

---

<sup>1</sup> Ahmad, M. "The Concept of Shura in Early Islamic Governance," *Islamic Studies Journal*, Vol. 45, No. 3, 2020, pp. 231-250.

<sup>2</sup> Khan, H. "Democracy in Islamic Perspective: Historical Foundations," *Middle Eastern Studies Review*, Vol. 10, 2019, pp. 117-135.

<sup>3</sup> Al-Jabri, M. "Shura and Political Participation in Early Islam," *Journal of Islamic Political Thought*, Vol. 5, 2018, pp. 78-92.

saat ini. Meskipun demikian, keterlibatan beberapa tokoh utama yang mewakili beragam kelompok dalam musyawarah tersebut menunjukkan adanya bentuk representasi yang mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa tradisi Islam awal telah memiliki pemahaman dan penerapan terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendukung pemerintahan yang inklusif, berbasis konsensus, dan memperhatikan kemaslahatan umat secara umum.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah dan mencoba mengaitkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Dengan melakukan kajian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana praktik kepemimpinan dalam tradisi Islam awal dapat dijadikan sebagai bahan refleksi yang relevan dengan wacana pemerintahan di era modern. Selain itu, artikel ini juga berupaya menjembatani diskusi antara tradisi Islam yang kaya dengan nilai-nilai moral dan sistem pemerintahan modern yang menekankan partisipasi dan akuntabilitas. Pada akhirnya, diharapkan kajian ini dapat menemukan hubungan yang bermakna dan memperkaya pemahaman kita tentang kontribusi nilai-nilai Islam terhadap konsep demokrasi kontemporer

## **Dinamika *Shura* sebagai Landasan Pengambilan Keputusan dalam Islam**

Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga merupakan salah satu peristiwa monumental dalam sejarah Islam yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerin-

---

<sup>4</sup> Rahman, F. "Islamic Governance and the Spirit of Inclusivity," *Islamic Horizons Journal*, Vol. 12, 2017, pp. 45-62.

tahan. Sebagai sahabat Nabi Muhammad, Utsman dikenal atas kelembutan, kedermawanan, dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Ia terpilih melalui mekanisme *Syura* (musyawarah), sebuah proses yang melibatkan enam sahabat utama yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum wafatnya<sup>5</sup>. Proses ini menunjukkan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan besar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Mekanisme ini mencerminkan inti dari prinsip Islam dalam memastikan bahwa pemimpin dipilih melalui proses diskusi kolektif, bukan secara otoriter.

Prinsip *Syura* ini memiliki kemiripan dengan beberapa aspek demokrasi modern. Dalam demokrasi, pengambilan keputusan umumnya didasarkan pada konsultasi, konsensus, dan partisipasi masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam, seperti penghormatan terhadap pendapat yang berbeda (ikhtilaf) dan tanggung jawab kolektif. Dalam pengangkatan Utsman, keenam sahabat yang terlibat mewakili pandangan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat pada waktu itu, sehingga proses ini menjadi simbol inklusivitas dalam memilih pemimpin.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sistem *Syura* pada masa awal Islam dan demokrasi modern. Demokrasi menekankan partisipasi langsung atau tidak langsung dari seluruh masyarakat melalui mekanisme pemilu universal, sedangkan *Syura* dalam pengangkatan Utsman dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang dianggap memiliki kompetensi dan kepercayaan<sup>7</sup>. Hal ini dipengaruhi oleh konteks sosial pada masa itu, di mana masyarakat Arab masih berstruktur tribal dan hierarkis. Dalam masyarakat semacam ini, pemimpin dipilih oleh

---

<sup>5</sup> Ahmad, M. "The Role of Shura in Early Islamic Leadership," *Islamic Studies Journal*, Vol. 45, No. 2, 2020, pp. 110-125.

<sup>6</sup> Esposito, J. L. *Islam and Politics*, 4th Edition. Syracuse University Press, 1998.

<sup>7</sup> Hallaq, W. B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press, 2005

tokoh-tokoh terkemuka yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan kelompok.

Struktur masyarakat tribal juga memainkan peran besar dalam proses musyawarah. Di satu sisi, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk keterbatasan partisipasi masyarakat secara luas. Namun, di sisi lain, tradisi tribal tersebut memiliki nilai representasi, karena tokoh-tokoh yang dipilih adalah mereka yang dipercaya oleh komunitasnya<sup>8</sup>. Representasi ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni memberikan tempat bagi pemimpin yang memahami kebutuhan umat dan bertindak atas dasar kemaslahatan.

*Syura* juga mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Para sahabat yang terlibat dalam proses musyawarah memiliki tanggung jawab besar untuk memilih pemimpin yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mampu menjaga prinsip-prinsip agama. Dalam demokrasi modern, akuntabilitas biasanya diwujudkan melalui mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam konteks Islam, akuntabilitas lebih terfokus pada tanggung jawab kepada Allah serta umat.

## **Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Demokrasi Kontemporer**

Kajian tentang *Syura* ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pemerintahan modern. Misalnya, nilai kolektivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat menjadi fondasi penting bagi praktik demokrasi

---

<sup>8</sup> Siddiqui, A. "Leadership and Tribal Structures in Early Islam," *Islamic Horizons*, Vol. 10, 2021, pp. 22-40.

kontemporer<sup>9</sup>. Dalam hal ini, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi salah satu contoh bagaimana Islam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem pemerintahan.

Pengangkatan Utsman juga memberikan wawasan tentang bagaimana proses *Syura* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat nilai moral. Sebagai bagian dari tradisi Islam awal, *Syura* tidak hanya bertujuan mencari konsensus, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin terpilih memiliki integritas, kemampuan, dan visi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam<sup>10</sup>. Hal ini menunjukkan bagaimana *Syura* menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.

Dalam konteks demokrasi modern, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat secara luas menjadi aspek penting. Meski demikian, demokrasi juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proses ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan pemimpin yang mampu memenuhi harapan rakyat. Pengalaman Islam awal, termasuk pengangkatan Utsman, dapat memberikan inspirasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam sistem demokrasi, sehingga pemimpin tidak hanya dipilih berdasarkan popularitas, tetapi juga kualitas.

Melalui kajian ini, dapat dilihat bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi universal yang dapat menjembatani diskusi antara tradisi keislaman dan sistem pemerintahan modern. *Syura* tidak hanya sekadar metode, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendukung pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kemaslahatan umat. Oleh karena itu, memahami pengangkatan Utsman bin Affan dapat menjadi langkah awal untuk

---

<sup>9</sup> Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.

<sup>10</sup> Rahim, A. "Islamic Leadership and Moral Responsibility," *Journal of Ethics in Islam*, Vol. 4, 2020, pp. 65-78

mengeksplorasi lebih jauh bagaimana tradisi Islam dapat memperkaya konsep demokrasi kontemporer.

Pada akhirnya, diskusi tentang pengangkatan Utsman bin Affan membuka peluang untuk refleksi yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Dengan menggali pengalaman sejarah ini, kita dapat membangun jembatan pemahaman antara nilai-nilai moral agama dan kebutuhan sistem pemerintahan yang responsif, adil, dan inklusif.

### **Kesimpulan**

Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan, terutama melalui mekanisme *Syura* (musyawarah). Proses ini, yang melibatkan enam sahabat utama, menekankan esensi konsultasi, kerja sama, dan representasi dalam pengambilan keputusan besar. Kendati berlangsung dalam konteks sosial yang sangat berbeda dengan era modern, nilai-nilai yang terkandung dalam *Syura* tetap memiliki relevansi universal dan mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi modern, seperti konsensus, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Mekanisme *Syura* menunjukkan bahwa para tokoh yang dipilih untuk berpartisipasi dipercaya mampu mewakili kepentingan masyarakat secara bijaksana, meskipun partisipasi langsung seluruh masyarakat belum diterapkan sebagaimana dalam demokrasi modern. Hal ini mencerminkan nilai representasi yang berakar pada struktur sosial tribal dan hierarkis masyarakat Arab pada masa itu. Dalam Islam, akuntabilitas pemimpin lebih menekankan tanggung jawab moral kepada Allah dan umat, yang

berbeda dengan akuntabilitas formal kepada rakyat sebagaimana dikenal dalam demokrasi modern.

Pengalaman pengangkatan Utsman bin Affan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kolektivitas, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat, dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Tradisi *Syura* menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya memiliki relevansi sejarah tetapi juga menawarkan potensi besar untuk memperkaya sistem pemerintahan kontemporer yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis moralitas.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, M. "The Concept of Shura in Early Islamic Governance." *Islamic Studies Journal*\* 45, no. 3 (2020): 231–250.
- . "The Role of Shura in Early Islamic Leadership." *Islamic Studies Journal*\* 45, no. 2 (2020): 110–125.
- Al-Jabri, M. "Shura and Political Participation in Early Islam." *Journal of Islamic Political Thought*\* 5 (2018): 78–92.
- Esposito, J. L. *Islam and Politics*\*. 4th ed. Syracuse University Press, 1998.
- Hallaq, W. B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*\*. Cambridge University Press, 2005.
- Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*\*. Islamic Texts Society, 2003.
- Khan, H. "Democracy in Islamic Perspective: Historical Foundations." *Middle Eastern Studies Review*\* 10 (2019): 117–135.
- Rahim, A. "Islamic Leadership and Moral Responsibility." *Journal of Ethics in Islam*\* 4 (2020): 65–78.
- Rahman, F. "Islamic Governance and the Spirit of Inclusivity." *Islamic Horizons Journal*\* 12 (2017): 45–62.
- Siddiqui, A. "Leadership and Tribal Structures in Early Islam." *Islamic Horizons*\* 10 (2021): 22–40.